

PERLAWANAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DAERAH

Agus Prasetya

Unit Program Belajar Jarak Jauh-Universitas Terbuka (UPBJJ-UT)

aguspratya@ecampus.ut.ac.id

Beni Dwi Komara

Progran Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik

benikomara@umg.ac.id

ABSTRACT

This research was motivated by the fact that there was resistance from street vendors in Madiun City as a manifestation of people's resistance to the country. The city of Madiun, the capital city of Bakorwil 1, Madiun, is economically developing so that the number of street vendors explodes. Therefore this area is economically meaningful and has high economic value, so it becomes the goal of workers seeking, namely as street vendors. To organize the traders in the city of Madiun and the DPRD make a PKL Regional Regulation. The PKL Regional Regulation is intended to regulate the PKL selling in the city of Madiun. But the process that happened to street vendors was less involved, causing resistance. There was people's resistance to the state, because the state did not prosper the people. The regulation made by the DPRD and the Madiun city administration aims to keep traders in order, and implement the rules, but the regulation creates resistance. This study aims to: (1) understand the causes of the street vendors' resistance (2) understand the meaning and purpose of street vendors' resistance to the Satpol PP. (3) understand the forms of street vendors' resistance to the Madiun city administration. The approach used in this study is qualitative with data collection techniques with observation, interviews and documentation. The paradigm in this study uses a social definition. While the theory used to explain the resistance of street vendors to the policies of the city government of Madiun James C. Scott's resistance theory.

Keywords: *Resistance, resistance, street vendors, relocation, regional regulations, Perda.*

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima selanjutnya disebut PKL, sebagai sektor informal merupakan katup pengaman ekonomi semakin meningkat, untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ada empat dasar mengapa studi tentang PKL tetap menarik dan relevan dilakukan, karena : Pertama, adanya peningkatan kuantitas PKL, salah satu persoalan di berbagai kota terutama kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Medan, Bandung. Hal tersebut disebabkan sedikit lapangan kerja dan masih sulitnya mencari pekerjaan serta banyak pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di pabrik dan perusahaan. Pendataan pasti PKL belum ada tetapi gejala bertambahnya terlihat yakni dengan semakin meningkatnya kuantitas pedagang. Memang data pasti berapa jumlah PKL di kota

Madiun belum ada, karena tidak tercatat secara resmi Disperindag Kota. Tetapi peningkatan jumlah pedagang dapat dirasakan dan dilihat, apalagi pasca Indonesia dilanda krisis moneter berkepanjangan sejak tahun 1997, sehingga di berbagai sudut jalan bermunculan PKL. (Disperindag: 2015)

Kedua, kebijakan Pemerintah Kota Madiun sebagai institusi yang memiliki kewenangan mengatur, menata, pembina pedagang mau tidak mau harus turun tangan. Kecenderungan seperti ini kalau dibiarkan tanpa adanya intervensi regulasi dari pemerintah kota, akan beresiko sosial dan harus dibayar mahal. Biaya sosial ekonomi pun kelak kemudian hari sangat besar, bila berkembang secara tak terkendali, tidak menutup kemungkinan menciptakan kerawanan sosial. Sejumlah

pengalaman menunjukkan bahwa sebuah lokasi bila dibiarkan dari serbuan kaum migrant akan membentuk perkampungan kumuh atau slum area. (Jawa Pos: 1-1 2016)

Ketiga, Reaksi dari PKL cenderung menolak relokasi, sudah berkali-kali pemerintah kota mengupayakan. Agar pedagang pasar yang memenuhi jalan, masuk kembali ke dalam pasar Jaya/Kotak. tetapi berkali-kali pula usaha tersebut tidak berhasil. Penertibanbedak-bedak, lapak-lapak yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal telah dilakukan pemerintah kota Madiun, namun respon pedagang pasif. (Paguyuban PKL: 2014)

Keempat, idealnya pusat kota tidak dihiasi dengan PKL, untuk itulah PKL harus ditata. Hal tersebut harus di lokalisasi pada suatu tempat agar keberadaannya tidak merusak kota, keindahan, kenyamanan, kebersihan, kesejukan kota. Maka lahirlah kebijakan relokasi pemerintah Kota Madiun yang memindahkan PKL dari jalan raya yang selama ini mereka tempati ke pasar “Kotak”.

Menurut Stauth (1982) dan Semsek (1986) sebagaimana dikutip oleh Evers (2000), mengungkapkan bahwa permasalahan sumber konflik PKL dengan pemerintah adalah aspek lingkungan sosial. Di samping itu kebersihan, keindahan, kenyamanan, keamanan, serta kesemrawutan terjadi sehari-hari. Selama ini aspek-aspek tersebut belum dapat menjelaskan perilaku protes PKL yang muncul di dalam sektor informal.

Penduduk Kota Madiun sesuai sensus penduduk 2015 (BPS; 2015) adalah 174.114 jiwa dengan sebaran 28.29 persen penduduk tinggal di 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo, dan Kecamatan Taman adalah 5.940 jiwa per km². Sementara kecamatan Kartoharjo Manguharjo 5.010 dan 4.642 orang per km². Secara keseluruhan kepadatan penduduk Kota Madiun 5.240 km² per km.

Sebagian penduduk kota Madiun bermata pencaharian sebagai pegawai negeri, sebagai wiraswasta, dan sebagai PKL. Data Hasil survey angkatan kerja Nasional menurut data dari

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Madiun tahun 2014 dari 52.073 keluarga, yang termasuk keluarga pra sejahtera yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, sebagian besar adalah PKL. Jumlah penduduk miskin tahun 2014 di Kota Madiun 5,35 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,66 persen, sedangkan garis kemiskinan di Kota Madiun adalah mengalami kenaikan pada tahun 2012, yaitu sebesar 280.299 (BPS 2014:172). Sebagian besar dari penduduk yang masuk garis kemiskinan adalah para penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, seperti PKL, sopir, pemulung, pengangguran, sehingga PKL bertebaran di seluruh jalan protokol dan tempat strategis kota. Untuk itulah pemerintah Kota Madiun menempatkan Pedagang Kaki Lima/ PKL dengan program relokasi ke pasar “Kotak”.

Kota Madiun di antara kabupaten sekelilingnya merupakan wilayah administrasi tersempit dengan penduduk terkecil pula, berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, penduduk kota Madiun berjumlah 174.114 jiwa. Meski demikian beberapa grafik menunjukkan indikator kesejahteraan kota Madiun mengalami peningkatan dibanding daerah lain, termasuk keluarga PKL yang ber KTP Kota Madiun. (BPS:2014)

PKL adalah salah satu jenis pekerjaan yang banyak digeluti masyarakat di kota-kota besar, di negara - negara yang sedang berkembang, para pelakunya kebanyakan adalah pengangguran tersembunyi. (Firmansyah: 1995) atau setengah pengangguran karena mereka bekerja dari 35 jam seminggu. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Pedagang Kaki Lima sebagai parasit, pelaku kejahatan atau pekerjaan yang semata- mata pekerjaan yang tidak releva. (Roggero & Ramli, 1992).

Semakin sempitnya lapangan pekerjaan di kota - kota besar, dan membengkaknya pengangguran di kota menyebabkan pelarian masyarakat adalah memasuki dunia sektor informal. Menurut Kartasmita lapangan kerja di Indonesia sektor pertanian 14%, sektor perdagangan 16%, sektor jasa 14%, sektor

industri 10,6%. (Kartasmita:1996:254). Dengan melihat data tersebut menunjukkan bahwa lapangan kerja dan sektor ketenagakerjaan sangat memprihatinkan. Apalagi saat ini dipicu banyaknya pabrik dan perusahaan yang henggang dari Indonesia, hal tersebut membuat lapangan kerja semakin sempit dan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keberadaan PKL tidak dapat dihindari dan terelakkan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, tetapi perlunya penataan, pembinaan, pengawasan, agar kehadirannya di masyarakat dapat membantu perekonomian daerah, peningkatkan PAD kota Madiun. Di samping itu keberadaan PKL dapat menjawab permasalahan ekonomi rakyat selama ini yakni pengangguran, kemiskinan, minimnya lapangan kerja.

Berdasarkan latar belakang dan kajian masalah dalam penelitian, maka yang menjadi fokus permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :“Bagaimanakah perlawanan PKL dalam proses Relokasi, dianalisis dengan teori perlawanan James C Scott?”. Secara khusus penelitian bertujuan antara lain:a.Menganalisis bentuk-bentuk perlawanan PKL terhadap Relokasi. b.Memahami tujuan PKL melakukan perlawanan.c.Memahami tahap-tahap perlawanan PKL akibat Relokasi ke pasar “Kotak”.

METODE PENELITIAN

Penelitian difokuskan ke fenomena sosial tentang perlawanan PKL pada pemerintah Kota Madiun. Peristiwa tersebut terjadi pada Relokasi PKL dari pusat Kota Madiun ke pasar “Kotak”. Kasus perlawanan tersebut diteliti melalui pendekatan metode kualitatif, sedangkan data bersifat subyektif, data penelitian berbentuk pernyataan kata-kata, narasi, maupun dokumentasi yang relevan.

Data dianalisis dalam terminologi respon-respon individual secara deskriptif. Selanjutnya data diidentifikasi sesuai kategori untuk menyortir dan mengorganisasikan data. (sorting organizing data). Semua itu bertujuan

mengorganisasi data ke dalam interpretasi, agar dapat menjelaskan fenomena yang dikaji.

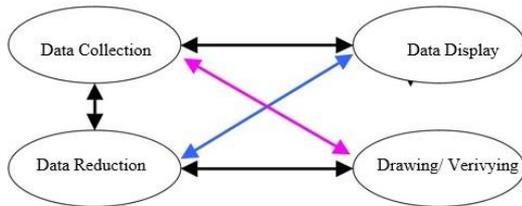
Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan fenomenologi yang lebih bersifat induktif dan dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Menjelaskan pengalaman-pengalaman apa yang dialami subyek selama perlawanan, termasuk interaksinya dengan kelompok lain. Hal ini sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini. Peneliti berusaha mengungkap fenomena tentang alasan mengapa perlawanan terselubung terjadi. Hal tersebut terjadi antara PKL dengan aparat satpol PP dalam relokasi PKL dari pusat kota ke pasar “Kotak” Kecamatan Kartoharjo kota Madiun dan bagaimana tujuan perlawanan terselubung tersebut.

Dengan melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat memperoleh konsep-konsep metode dan analisis secara holistik dengan tujuan mempertahankan keutuhan atau wholness dari obyek. Keutuhan yang dimaksud adalah faktualisasi data secara empiris, peran obyektifitas peneliti dalam melakukan informasi terhadap paguyuban Pedagang Kaki Lima. Analisis data yang dilakukan melalui tahapan mereduksi data (data reduction), menampilkan/mengeksplorasi data (data display) dan memilih simpulan data penelitian. (Conclusion/Verification).

TEKNIK PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menggunakan berbagai macam sumber, dilakukan di beberapa lokasi di kota Madiun dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan diperkuat dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan terus menerus hingga tuntas untuk mendapatkan validasi data yang tinggi. Teknik *snowball* sampling yang dipergunakan, dimana pengambilan datanya akan dihentikan apabila data yang didapat sudah jenuh. Data yang dikumpulkan umumnya dalam bentuk kuantitatif meskipun tidak menutup kemungkinan ada pula data kualitatif yang didapatkan. Sedangkan pengolahan datanya sudah dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama proses

dilapangan dan setelah selesai dari lapangan. Artinya pengolahan data sudah dimulai sejak peneliti merumuskan masalah hingga peneliti menuliskan hasil dari penelitian tersebut. Sedangkan fokus pengolahan data pada model penelitian kualitatif terletak pada saat dilapangan ketika pengumpulan data.



Gambar: Pengolahan data Model Interactive Miles dan Huberman

LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Madiun karena sebagai berikut : (1) Kota Madiun, mempunyai pasar tradisional yang cukup banyak di masa lalu (2) Eksistensi pasar rakyat diakui masyarakat dan diminati oleh masyarakat karena harga barang murah dan terjangkau serta menjadi idola masyarakat .(3) dengan memiliki pasar tradisional dalam jumlah besar Kota Madiun, dikenal sebagai kotanya yang banyak pedagang tradisional maupun pedagang sector Informal seperti Pedagang Kaki Lima karena masa depan yang cerah.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data menggunakan *deskriptif interpretatif* yang didukung dengan Teori Miles dan Huberman. Tujuan analisa data adalah menyempitkan data dan membatasi penemuan-penemuan menjadi data yang terartur, serta tersusun dan lebih berarti. Adapun untuk keperluan analisa data yang berhasil dikumpulkan, diperlukan teknik analisa yang sesuai dengan jenis data yang ada antara lain:

1. Validitas, dalam mengukur validitas mengacu pada isi dan kegunaan alat ukur, validitas internal maupun validitas eksternal. Adapun yang dimaksud dengan validitas internal adalah seberapa jauh suatu alat ukur mampu menggambarkan obyek yang akan

diukur. Validitas eksternal adalah dalam kaitannya dengan alat ukur pada situasi berbeda

2. Realibilitas, dalam menentukan realibilitas ini maka beberapa hal yang dapat di jadikan standar yaitu:
 - a) Akurasi atau ketepatan, yaitu dapat memberikan kontribusi pemahaman yang utuh terhadap obyek yang di ukur.
 - b) Kemantapan, yaitu bila pengukuran direplikasi akan memberi hasil yang sama, tetapi dengan memperhatikan kondisi pada saat pengukuran relatif tidak berbeda.
 - c) Homogenitas, dimana adanya kaitan yang erat antara satusama lain.

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam penelitian kualitatif ini, maka perlu di perhatikan beberapa hal:

- Di laksanakan dalam kondisi sewajarnya atau sealami mungkin.
- Memperlakukan orang yang bertindak sebagai informan, secara manusiawi dan menjunjung tinggi perspektif untuk partisipasi.
- Hasil penelitian dibahas secara *diskriptif* dan sintesis.
- Kekurangan dalam penelitian akan dikemukakan secara transparan. (Kanto, 1998: 3-9). Selanjutnya pada pengolahan data ini proses analisa data baik

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Perlawanan ini merupakan aksi pedagang sebagai ungkapan terhadap suatu masalah yakni adanya relokasi. Dalam kasus relokasi pedagang dari Jalan : Batanghari, jalan Nori, jalan Barito kawasan pusat kota antara pemerintah Kota Madiun dengan PKL yang tergabung dalam “Paguyuban Pedagang Kaki Lima “. Pemerintah bermaksud untuk menata PKL di suatu tempat yakni Pasar Kotak, sedangkan pedagang menolak relokasi karena tempat baru jauh dari pusat kota. Konsumen sepi, tidak ramai perlu waktu untuk menyakinkan pelanggan seperti lokasi lama.

Perlawanan PKL dengan aksinya membiarkan, tolak memperbaiki lapak, marah-marah, misuh-misuh (perlawanan) merupakan ekspresi pedagang dalam merespon kebijakan

relokasi PKL ke pasar “Kotak” oleh Pemkot Madiun. Berikut ini tujuan dan makna perlawanan PKL pada satpol PP Kota Madiun, setelah proses observasi, indepth interview serta mempelajari dokumentasi yang ada baik di Disperindagkoppar kota Madiun, paguyuban PKL sub pengurus pasar ‘Kotak’ sebagai berikut :

Relokasi PKL dari pusat kota (Jalan Batanghari, Jalan Nori Jalan Barito) ke pasar “Kotak” bertujuan merupakan program penataan, penempatan pedagang, secara terpadu dalam rangka menciptakan keindahan, kenyamanan, sejuk, ketertiban, ciptakan kota sehat. Makna bagi PKL, membuat kecewa, sakit hati, marah, sulit jualan, perjuangan hidup, karena lokasi jauh dari pusat kota, lokasi masih sepi, konsumen lama hilang. Lahirlah perlawanan pedagang yang disebabkan relokasi di tempat baru, hal tersebut disebabkan pedagang takut jualan tidak laku, tidak dapat uang.

Sedangkan bentuk-bentuk perlawanan dalam kasus relokasi PKL sebagai berikut : Dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Kota Madiun tentang Relokasi, pemerintah melakukan tindakan persuasif. Pedagang Kaki Lima/ PKL memberikan respon dengan melakukan perlawanan yang bersifat perlawanan terbuka, perlawanan tertutup, perlawanan semi (campuran) pada proses relokasi pedagang pada tanggal 31

Desember 2015, hal ini sesuai dengan teori perlawanan James C Scott. Program Relokasi oleh pemerintah kota Madiun merupakan langkah legal secara hukum dalam melaksanakan program penataan yang diamanatkan oleh Perda. Sedangkan reaksi PKL bermacam-macam selaras ungkapan isi hati mereka yang masih emosi.

Pembahasan hasil diskusi dilakukan untuk memberikan suatu jawaban pada permasalahan yang harus diungkap melalui proses penelitian selaras dengan teori yang digunakan. Agar semua menjadi jelas dan sesuai dengan relevansi fokus penelitian, maka temuan dalam penelitian ini mengungkap permasalahan Perlawanan terhadap Relokasi pedagang di Kota Madiun. Kasus perlawanan tersebut, diperkirakan sudah terjadi sejak adanya kebijakan pemerintah kota Madiun yakni adanya relokasi, penataan PKL dari pasar Loak di jalan Barito, jalan Batanghari, dan jalan Nori ke pasar “Kotak” Kecamatan Kartoharjo.

Konsep pemikiran keduanya berbeda sehingga menyebabkan perlawanan oleh

pedagang yang direlokasi, berikut pernyataan tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa perlawanan PKL sebagai wujud konflik karena kurangnya sosialisasi pemerintah daerah dalam relokasi pedagang ke pasar “Kotak” kartoharjo. Pandangan tersebut memberi petunjuk adanya perbedaan penafsiran dalam Perda No: 14/tahun 2012. Hasil analisis yang dikemukakan bahwa perlawanan terselubung tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menyikapi relokasi pedagang dari Jalan Batanghari, Jalan Barito, Jalan Nori ke lokasi baru Pasar Kotak Kartoharjo Kota Madiun.

Konflik yang berawal dari perbedaan pandangan ini rupanya berkembang menjadi sebuah persoalan, ketika merambah kepada kepentingan sepihak sesuai tujuannya. Pemerintah kota Madiun menjalankan Perda No 14/tahun 2012 tentang, penertiban pedagang salah satunya relokasi seluruh pedagang ke pasar Kotak agar menjadi satu semua PKL dan terbentuklah “ Informal Market Integrated”. Sedangkan pedagang belum memahami maksud kehendak pemerintah kota Madiun tentang relokasi yang salah satunya untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Perlawanan pedagang lebih merupakan bentuk manifestasi konflik dari pada sebagai sebab konflik, hal ini masalah senjata yang dipilih oleh pihak berkonflik untuk mengeksperisikan diri permusuhan mereka (dalam Susan N, 2009). Selanjutnya yang dimaksud dengan senjata dalam penelitian ini adalah nilai solidaritas kelompok yang kuat dan sikap diskursif pada kelompok lain (pemerintah) yang tinggi dan didukung oleh anggota PKL yang cenderung ikut pemerintah tapi relatif sedikit. Sedangkan ada kecenderungan konflik bersifat sementara.

Dengan begitu perlawanan yang terjadi meliputi tindakan non kekerasan hanya ungkapan perasaan marah-marah, ngrasani, ngrundel, berkata kotor, ngedumel, kecewa, tidak puas. Dengan demikian perlawanan (James Scott, 1993 : 45). Adalah perlawanan yang dilakukan pedagang menanggapi relokasi pedagang dari jalan Batanghari, jalan Barito, jalan Nori adalah dengan bersikap non -kekerasan, demonstrasi, merusak fasilitas, berkelahi secara fisik-, yang jelas tidak ada tindakan fisik kepada aparat satpol PP pada saat perlawanan.

Mereka, PKL hanya bersikap kecewa, ngrasani, marah-marah, mengeluh, ngedumel, tidak puas dengan kebijakan relokasi oleh

pemkot kota Madiun, atas desakan semua pihak pada pedagang. Agar tidak menentang, menolak rencana pemkot relokasi PKL. Sebab maksud dan tujuan secara makro baik, yakni membuat Kota Madiun indah, tertib, bersih, sejuk, damai banyak ruang hijau terbuka disediakan, hal tersebut juga merupakan keinginan DPRD Kota Madiun untuk ciptakan Kota indah, sejuk, tertib, bersih, indah. Rupanya masukan dari berbagai tokoh mereka terima akhirnya bersedia relokasi ke pasar "Kotak", hal tersebut selaras dengan teori perlawanan James C.Scott, guru besar ilmu politik Harvard University USA.

3. Jika akan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang atau masalah ekonomi masyarakat hendaknya sosialisasi secara maksimal dan solusi dicarikan terlebih dahulu, jangan asal keluaran kebijakan publik.
4. Sedangkan yang berkaitan dengan management konflik, yakni bagaimana mensikapi perlawanan pedagang selama ini menjadi motivasi untuk suatu "Perubahan"
5. Perubahan yang dimaksud meliputi perubahan mental, cara berfikir, dan perubahan kualitas pedagang dalam berdagang dan perubahan pemerintah Kota Madiun dalam keluaran kebijakan publik.

TEMUAN PENELITIAN

Perlawanan PKL  Pemerintah Kota Madiun

(Teori Perlawanan: James Scott)

- Perlawanan Terbuka ◇ terjadi pada awal relokasi
- Perlawanan Campuran/semi ◇ terjadi tengah relokasi
- Perlawanan Tersembunyi ◇ terjadi dalam proses Pasca Relokasi.

KESIMPULAN

Terjadinya perlawanan oleh PKL dalam proses Relokasi pedagang ke pasar 'Kotak' dapat diidentifikasi beberapa prinsip yakni :

1. Sebagai pengawal perdaNo :14/ tahun 201, PKL harus Relokasi.
2. Adanya perda No.14/tahun 2012 tentang penataan pedagang, diperlukan Relokasi.
3. Proses sosialisasi relokasi yang kurang intensif, sehingga PKL tidak faham jika akhir tahun 2015 harus pindah.
4. Adanya tindakan satpol PP. pemkot yang represif kepada PKL.
5. Tidak adanya pesangon dan kompensasi terhadap PKL yang direlokasi.
6. Adanya tindakan aparat pemerintah kota yang menyita lapak dan barang dagangan milik PKL.
7. Adanya perlakuan kasar satpol PP. pemkot pada waktu Relokasi PKL.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu disarankan yakni:

1. Secara organisasi perlu membangun sistem pengelolaan organisasi yang profesional pada organisasi PKL yang dikenal dengan "Paguyuban Pedagang Kaki Lima".
2. Adanya pembinaan yang baik dari pemerintah Kota Madiun, khususnya Disperindag. terhadap pedagang-pedagang sektor Informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, 2005. Perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap pemerintah Kota Surabaya. Disertasi Unair 2005.
- Basrowi, 2006. Konflik Pedagang Kaki Lima dengan satpol PP dan Permasalahannya, Penerbit Obor Indonesia. Chandra, R.I.1992. Konflik dalam hidup sehari-hari. Yogyakarta: Penerbitan Kauius.
- Dahrendorf, R1958.Out Utopia: Toward a Reorientasi of Sociological Analysis. American Journal of Sociology 64.
- George Simmel, 1903. The Sociology of Conflict : 1 (American Journal of Sociology) James C.Scott. Perlawanan Kaum Tani, Penerbit : Yayasan Oboe Indonesia. Jakarta, 1993.
- Hendriks,W.,1992. Bagaimana Mengelola Konflik. Diterjemahkan oleh: Arif Santoso. Jakarta: BumiAksara.
- Hubermann and Miles 1999. Analisis Penelitian Kualitatif,
- K..Yin, Robert, 1996.Studi Kasus: Desain dan Metode, Penerbit Raja Grafindo. Jakarta.
- Kartono 2005, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam menghadapi Permasalahan, Penerbit Obor Indonesia 2005.
- Kepolisian Resort Kota Madiun, 2016. Data Kasus Konflik Pedagang Sektor Informal
- Koencaraningrat,Saefudin, Fedyani Ahmad, (2007) Jaringan Sosial dalam Organisasi, Raja Grafindo Persada.

- Kusmahadi, Didik 2013. Kantor Disperindagkoppar: Pedagang Kaki Lima dan Permasalahannya, Arsip Dokumentasi Disperindag, 2014.
- Miles Matthew B, Huberman Michael.A., (1984) *Qualitative Data Analysis :A Sourcesbook of New Methods* : London. Sage Publications, Beverly Hills. Pip Jones,2010. *Teori-teori Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Polak, M.(1982) *Sosiologi : Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT. Ictiar Baru.
- Poloma,M.1994. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada & Yayasan Solidaritas Gajah Mada.
- Pruitt, Dean G, and Hee Kim, Sung. *Sosial Konflik: Escalationa, Stalemate and Statelmen*(3 rd Edition). New York : McGraw-Hill.
- Rachbini Didik dan Abdul Hamid 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan*. (Jakarta LP3ES 1994)
- Rendall.C, 1975, *Conflict Sociology: Toward and Eplanary Science*. Academic Press.
- Ritzer, George 2004, *Teori Sosiologi dari masa Post Modern sampai Modern*, Jakarta Kencana 2004.
- Rule James.B. 1988. *Theoritis of Civil Violence*. Barkeley: University of California Press.
- Scott, John. 2012. *Teori Sosial, Masalah-masalah Pokok Dalam Sosiologi*, 2012. Penerbit.Pustaka.Pelajar. Jogjakarta,2012.
- Siahaan Hotmann 1996, *Pembangkangan Terselubung Petani dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi sebagai Upaya mempertahankan Subsistensi*. (Surabaya, Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya Perss 1996).
- Soerjono Soekanto., (1987) *Pengantar Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Susan N., 2009. *Sosiologi Konflik. Isu-isu Konflik Kontemporer: Edisi 1 Cetakan ke 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Todaro Micheil P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta Erlangga 2000.
- Undang –Undang Dasar 1945 dan GBHN 1988.
- Wahjudi., (2006) *Managemen Konflik dalam Organisasi. Pedoman Praktis bagi Pemimpin*
Vsisioner, (edisi Kedua) Bandung. Penerbit Alvabetta.
- Winardi (2007) *Managemen Konflik (Konflik Perubahan danPengembangan)* Bandung, Mandar Maju.